

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teluk Bintuni merupakan kabupaten terkaya di Indonesia berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019, Teluk Bintuni berada di posisi teratas sebagai kabupaten terkaya dengan PDRB per kapita yang menyentuh angka Rp487,41 juta (dalam Aditiya, 2021, para. 9). PDRB kabupaten ini unggul empat kali lipat dari ibu kota Provinsi Papua, yakni Jayapura.

Namun, nasib masyarakat Teluk Bintuni tidak sebanding dengan predikatnya sebagai kabupaten terkaya karena adanya ketimpangan sosial-ekonomi. Mengutip dari BPS, Teluk Bintuni justru menempati posisi ke-29 dari 548 kabupaten/kota dengan masyarakat miskin di Indonesia (“Persentase Penduduk Miskin”, 2020). Data mencatat, terdapat 29,39 persen masyarakat miskin secara ekonomi di Teluk Bintuni. Bahkan, per 2021, pemerintah masih memiliki utang terhadap masyarakat adat Suku Sebyar, Teluk Bintuni atas dana bagi hasil bumi dan gas (“Senator Filep Dukung”, para. 1-2, 2021). Setidaknya, pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia harus membayar Rp32,4 miliar kepada masyarakat Suku Sebyar (“Komisi VII DPR”, 2020, para. 2).

Bila dilihat secara lebih umum, Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga mencatat bahwa provinsi dari Teluk Bintuni, yakni Papua Barat berada di peringkat 33 dari 34 provinsi perihal indeks literasi (dalam Solihin et al., 2019, p. 58). Tingkat literasi masyarakat Papua Barat diklasifikasikan dalam kategori rendah.

Selain itu, jumlah sekolah yang ada di Papua Barat pun timpang dan lebih sedikit bila dibandingkan provinsi lainnya. Ini dapat menghadirkan ketimpangan ekonomi antara penduduk yang teredukasi dan tak teredukasi. Kualitas pendidikan dapat berpengaruh pada pendapatan pekerja yang diperoleh karena perbedaan kualitas sekolah atau jurusan antarwilayah (Wahyuni & Monika, 2017, p. 15). Martins dan Pereira menyebut, tenaga kerja yang lebih terampil dan teredukasi

disebut dapat memperoleh pendapatan per jam yang lebih tinggi (dalam Wahyuni & Monika, 2017, p. 24). Menurut statistik Kemendikbud, pada tahun ajaran 2019/2020, ditulis bahwa hanya terdapat 1.071 Sekolah Dasar (SD) dari total 149.435 SD di Indonesia (Rida et al., 2020, p. 121). Kemudian, hanya ada 310 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Papua Barat dari total 40.559 SMP (Rida et al., 2020, p. 122). Data Kemendikbud juga mencatat bahwa jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Papua Barat hanya berjumlah 122 dari total 13.939 SMA (Rida et al., p. 123, 2020). Terakhir, jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Papua Barat hanya berkisar di angka 54 dari total 14.301 SMK (Rida et al., 2020, p. 124).

Isu ketimpangan sosial-ekonomi ini pun kerap dinomorduakan karena ada kecenderungan media arus utama, terutama televisi yang *jakartasentris*. Armando menyebut bahwa siaran televisi hanya terfokus pada keadaan Jakarta sehingga isu-isu regional atau lokal memiliki ruang yang sedikit (dalam Fernando, 2021, p. 5). Armando juga menjelaskan, hal ini disebabkan stasiun televisi yang hanya berbasis di Jakarta, maka konten-konten di daerah tidak terjangkau tanpa adanya stasiun lokal (dalam Fernando, 2021, p. 5). Menurut Lindawati, isu daerah kurang dijadikan perhatian oleh media karena permasalahan DKI Jakarta lebih menarik dengan isu-isu politiknya (dalam Fernando, 2021, p. 8). Lindawati meneruskan, isu daerah, terutama desa cenderung berkonotasi negatif dengan isu kemiskinan, kriminalitas, dan bencana sehingga dianggap kurang bernilai.

Menurut data, Provinsi DKI Jakarta dan Pulau Jawa memang mendominasi jumlah pemberitaan di media. Dalam riset Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) pada 2013, ditemukan bahwa 34,1 persen konten media massa terfokus pada isu DKI Jakarta, sedangkan isu Jawa sebesar 69,9 persen (dalam Fernando, 2021, p. 8). Penelitian oleh Heychael dan Wibowo pun memperoleh data yang serupa. Setidaknya, untuk jumlah berita oleh televisi, 48 persen didominasi isu dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), sedangkan isu di luar Jabodetabek berkisar di angka 45 persen, berita internasional di angka 10 persen, dan berita kompilasi di angka 4 persen (Heychael & Wibowo, 2014, p.

7). Riset-riset tersebut membuktikan bahwa pemberitaan isu daerah masih belum jadi prioritas media.

Beberapa masalah yang dirasakan masyarakat Teluk Bintuni adalah kemiskinan, minimnya proyek pembangunan, dan kurangnya fasilitas publik (Y. Ogoney, komunikasi pribadi, 17 Maret 2022). Selama kepemimpinan periode kedua Bupati Petrus Kasihw (sejak 2019), berbagai program kerja dinilai masyarakat tidak optimal (R. Samaduda, komunikasi pribadi, 2 Maret 2022). Berbagai pembangunan dianggap jauh dari kata sempurna, dibandingkan pemerintah di era bupati sebelumnya. Masalah-masalah yang menimpa masyarakat, terutama warga adat di Teluk Bintuni pun terus membuat para warga menderita kemiskinan.

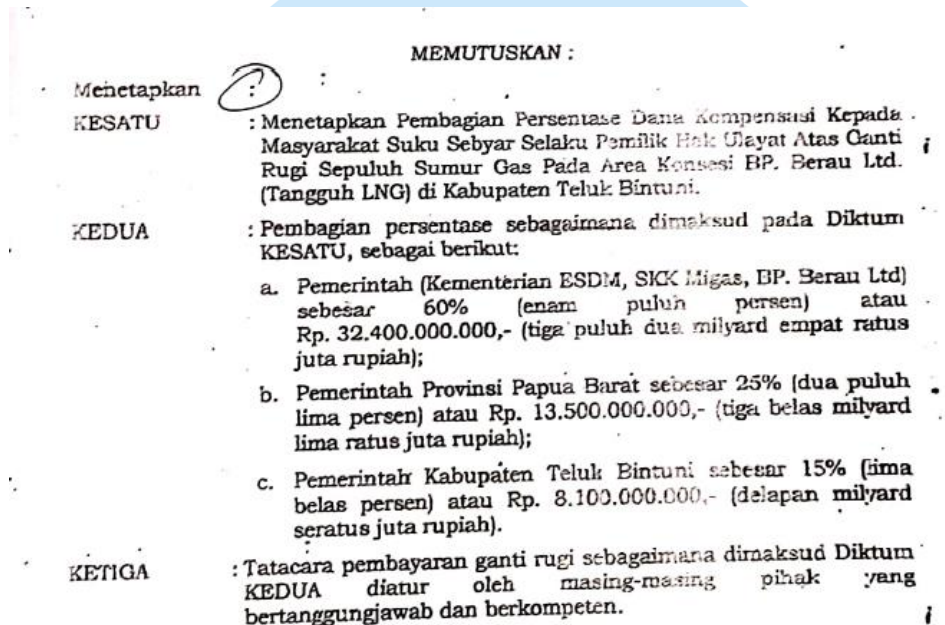
Menurut Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Teluk Bintuni punya cadangan migas sebesar 23 triliun kaki kubik *Liquified Natural Gas* (LNG) dan 45 juta ton minyak bumi saat ditemukan pertama kali pada 1990-an (dalam Mayawati & Kusnadi, 2009, p.1). Dengan adanya potensi ini, berbagai perusahaan masuk untuk mengeruk migas, salah satunya British Petroleum (BP) lewat BP Berau dengan proyek bernama Tangguh LNG pada 1997. Masa konstruksi LNG Tangguh dimulai pada tahun 2004 (“The Tangguh gas”, (n.d.), para. 1). Namun, terjadi perseteruan antara perusahaan dengan warga.

Pada 2004, dilaksanakan Pra Gelar Alas Tikar Adat di Distrik Tomu, Teluk Bintuni untuk menyepakati hak yang harus diterima warga yang terdampak di Tomu, Taroi, dan Weriagar (S. Kaitam, komunikasi pribadi, 9 Maret 2022). Disepakati: perusahaan harus membayar Rp10 miliar per sumur dengan total enam sumur yang sudah dikeruk sehingga totalnya warga harus mendapat Rp60 miliar untuk hak ulayat. Namun, hak itu tidak diterima warga sama sekali hingga Maret 2022.

Pada 2014, Gubernur Papua Barat akhirnya mengeluarkan beleid tentang pembagian dana kompensasi, bahwa pemerintah pusat (Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BP) harus membayar Rp32,4 miliar kepada warga (S. Kaitam, komunikasi pribadi, 9 Maret 2022). Kemudian Pemprov Papua Barat harus membayar sebesar Rp13,5 miliar dan Pemkab Teluk Bintuni sebesar Rp8,1 miliar.

Pemprov dan Pemkab pun sudah membayarnya, tetapi pemerintah pusat bersama BP belum.

Gambar 1.1 Keputusan Gubernur Papua Barat No. 542/269/12/2014 Tahun 2014



Sumber: Dokumentasi penulis

Pembangunan di Tomu sebagai salah satu distrik penghasil migas BP pun disebut tidak maju (S. Kaitam, komunikasi pribadi, 9 Maret 2022). Banyak masyarakat miskin dan tidak sejahtera, ditambah sulitnya akses untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk air bersih, warga bahkan harus mengonsumsi air sungai atau hujan yang dimasak terlebih dahulu (A. Manuama, komunikasi pribadi 9 Maret 2022). Tidak ada perkembangan berarti, ditambah fasilitas publik seperti jembatan yang tak kunjung diperbaiki.

Di Merdey, ada Yustina Ogoney yang mengupayakan pengembangan daerah dengan menjadi kepala distrik (Sulfianto, komunikasi pribadi, 23 Februari 2022). Yustina mengakui bahwa meskipun berada di dalam sistem pemerintah, ia harus bekerja ekstra agar proyek yang diusulkan warga bisa terealisasi (Y. Ogoney, komunikasi pribadi, 17 Maret 2022). Bahkan, warga sampai marah pada dirinya karena dianggap tidak bekerja, padahal pemerintah daerah yang sebenarnya

inkompeten. Dari berbagai permasalahan yang ada, ditemukan satu nama yang dianggap paling bersalah oleh warga: Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihw.

Dengan demikian, penulis akan memproduksi program dokumenter audio visual (video) dengan fokus utama Teluk Bintuni. Format dokumenter dipilih karena ingin membahas suatu isu dengan menunjukkan realitas di lapangan. Ini sesuai dengan pemaknaan dari video dokumenter, yakni sebuah format yang menekankan peristiwa dan suara-suara yang nyata, serta melibatkan orang-orang sebagai pelaku peristiwa (Oramahi, 2017, p. 58). Format ini dipilih agar khalayak dapat merasa lebih dekat dengan masyarakat Teluk Bintuni lewat visualisasi gambar dan audio. Penulis akan menghadirkan peliputan terkait ironisme dan suara warga atas permasalahan di kabupaten terkaya Indonesia, Teluk Bintuni. Penulis bertujuan untuk mengajak para *stakeholder* serta khalayak untuk lebih mengenal Teluk Bintuni. Lalu, penulis juga berharap masyarakat juga dapat lebih peduli akan ketimpangan dan permasalahan yang terjadi di Teluk Bintuni, serta proaktif untuk mengembangkan daerah-daerah yang masyarakatnya belum sejahtera, terutama Teluk Bintuni.

Penulis akan memproduksi dua episode video. Episode pertama (masuk ke dalam episode 2 dalam serial) akan membahas permasalahan sosial-ekonomi yang muncul karena usaha migas di Tomu, Teluk Bintuni. Episode kedua (masuk dalam episode 6 dalam serial) akan menampilkan suara warga Merdey dan jajaran di bawah Bupati Petrus Kasihw, ditambah wawancara eksklusif dengan Petrus yang menjawab segala keluhan warga dari semua episode “Rumah Torang”.

Untuk produksi program ini, penulis pun akan menerapkan metode etnografi komunikasi untuk mengkaji dan mengetahui pola komunikasi masyarakat Teluk Bintuni dalam berkehidupan sehari-hari. Etnografi komunikasi adalah cabang ilmu yang mengkaji perilaku berbahasa suatu komunitas atau etnik, utamanya tentang bagaimana bahasa digunakan oleh masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda (Haryono, 2015, p. 124). Metode ini dipakai agar penulis dapat memproduksi karya dengan memahami kultur budaya di Teluk Bintuni sehingga tidak ada gesekan selama proses dilakukan dari tahap praproduksi, produksi, hingga pascaproduksi.

Dalam produksi karya ini, penulis memakai teori *agenda setting*. Teori ini merupakan penerapan peran media massa sebagai pihak yang memiliki pengaruh atas pendapat dan perilaku masyarakat. Media massa memiliki kekuatan untuk menentukan terkait agenda terhadap isu yang dirasa penting (Ritonga, 2018, p. 34). Dengan teori ini, penulis ingin karya “Rumah Torang” dapat menjadi agenda media yang penulis ajak berkolaborasi sehingga bisa tercipta agenda publik (merujuk pada penonjolan isu terkait opini publik) dan agenda kebijakan (merujuk pada kebijakan para politisi terkait suatu isu). Ini ditujukan agar masyarakat Teluk Bintuni dapat memperoleh manfaat dari peran media sebagai pencipta *public awareness*.

Penulis akan mengkolaborasikan “Rumah Torang” dengan media digital Narasi. Dalam laman *narasi.tv*, tertulis bahwa Narasi mencoba untuk tetap mengedepankan idealisme, nilai-nilai kemajemukan, kritis, toleran, dan mendorong anak bangsa untuk rela menggagas peran (“Indonesia tak tersusun”, 2021, para. 3). Aspek-aspek yang Narasi anut sesuai dengan tujuan dari produksi “Rumah Torang”. Penulis mencoba untuk mengedepankan idealisme dalam produksi konten dengan menghadirkan isu tentang daerah yang mengalami ketimpangan. Penulis juga mencoba mengajak khalayak lebih kritis dan proaktif kepada pemerintah dan kebijakannya dengan melihat realitas di Teluk Bintuni. Terakhir, penulis pun ingin agar penonton dapat tergerak untuk berperan dalam mengembangkan daerah agar dapat lebih maju. Dengan demikian, kesamaan-kesamaan nilai tersebut membuat penulis tertarik untuk mengajukan kolaborasi dengan Narasi.

Narasi pun kerap mengangkat isu-isu tentang masyarakat yang termarginalkan dan daerah, seperti ancaman yang didapatkan keluarga korban pemerkosaan ketika ingin melaporkan pelaku dan proyek wisata Bromo Tengger Semeru yang berpotensi merusak kearifan lokal. Demikian, Narasi merupakan media yang memproduksi konten audio visual dan menjadi relevan dengan konten yang penulis produksi, yakni video dokumenter.

Kemudian, penulis turut merelevansikan program serial dokumenter “Rumah Torang” dengan teori *new media*. Teori ini mengacu pada era ketika teknologi komunikasi yang kini terdigitalisasi dan bisa dipakai oleh khalayak secara meluas (McQuail, 2010, p. 740). Media sosial merupakan salah satu medium

distribusi konten dari *new media* (McQuail, 2010, p. 181, 183). Dikarenakan konten “Rumah Torang” akan didistribusikan lewat media sosial YouTube, teori ini membantu penulis untuk lebih memahami karakteristik konten jurnalistik *new media*. Harapannya, “Rumah Torang” dapat terdistribusi dengan tepat guna, sesuai dengan karakteristik media sosial sebagai *new media*.

Penulis pun akan berorientasi pada konsep jurnalisme solusi dengan menghadirkan pemberitaan yang bisa membuka mata khalayak dari perspektif warga. Suara warga nantinya dapat menjadi solusi bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja mereka. Kemudian, konsep *visual storytelling* juga akan menjadi acuan karya penulis karena produksi “Rumah Torang” akan berbasis audio visual dengan format video dokumenter.

Program “Rumah Torang” menargetkan penonton dari generasi Y dan Z. Ini dikarenakan kedua generasi tersebut memiliki karakteristik dan nilai hidup yang serupa dengan tujuan penulis. Generasi Y disebut merupakan sosok yang sangat menghargai perbedaan dan mau mencoba segala hal (Lancaster, 2004, p. 2). Penulis berharap agar penonton yang merupakan generasi Y dapat tergerak setelah menonton “Rumah Torang” dan terdorong untuk menggerakkan Teluk Bintuni di masa mendatang dengan cara apa pun.

Karakteristik ini pun juga selaras dengan program pemerintah yang ingin para milenial (generasi Y) untuk mengembangkan potensi wisata desa (“Desa wisata menjadi”, 2021, para. 1). Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebut bahwa generasi Y dan Z memiliki kreativitas luar biasa sehingga dapat muncul pula inovasi yang *out the box* (“Desa wisata menjadi”, 2021, para. 2). Terkini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga berkolaborasi dengan GenPi (Generasi Pesona Indonesia), komunitas yang mempromosikan pariwisata Indonesia (“Desa wisata menjadi”, 2021, para. 6). Kolaborasi itu berbentuk edukasi dan promosi pariwisata di berbagai daerah, mengingat GenPi yang anggotanya didominasi para milenial dan generasi Z.

Sedangkan, generasi Z memiliki kecenderungan untuk bertindak secara intuitif atau mengikuti kata hati (Bencsik & Juhász, 2016, p. 95). Generasi Z juga dianggap merupakan sosok yang berani dan suka berinisiasi. Sehingga, diharapkan

khalayak generasi Z dapat tergerak hatinya untuk lebih peduli kepada masyarakat Teluk Bintuni dan meningkatkan potensi munculnya agenda publik yang ditujukan penulis.

Berdasarkan sejumlah argumentasi di atas, pembuatan karya “Rumah Torang” menjadi sangat penting karena terdapat berbagai potensi di Teluk Bintuni, kabupaten terkaya yang masih memiliki permasalahan ketimpangan sosial-ekonomi. Karya ini diharapkan bisa menjadi agenda media yang dapat berubah menjadi agenda publik, yakni dengan memaparkan problematik yang ada di Teluk Bintuni. Penulis juga ingin karya ini dapat menjadi agenda kebijakan, yakni pemerintah yang lebih menuntaskan permasalahan dan mengembangkan potensi Teluk Bintuni sehingga masyarakatnya dapat lebih sejahtera.

1.2 Tujuan Karya

Karya ini pun memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Berikut beberapa tujuan dari karya “Rumah Torang”.

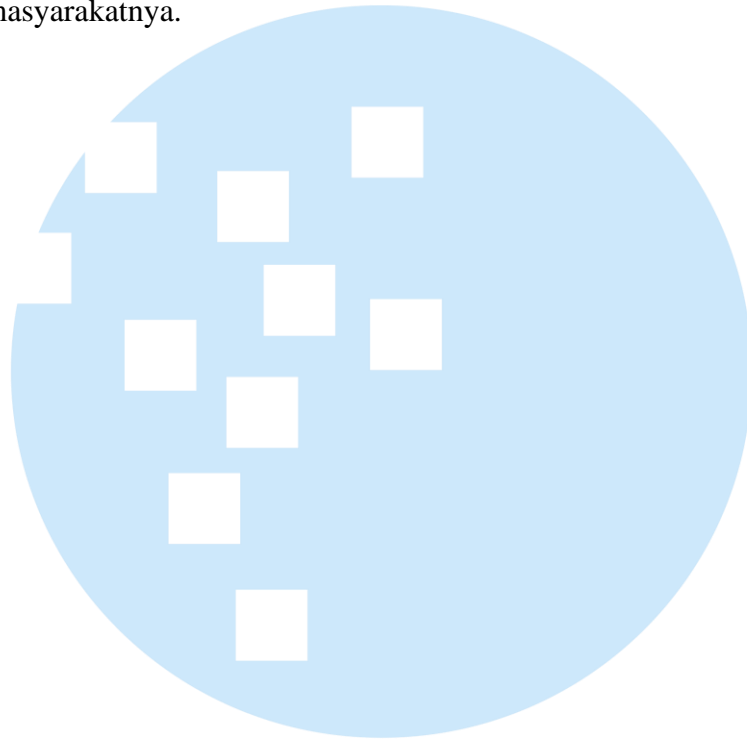
- a. Menghasilkan produk jurnalistik yang bisa ditonton secara *on demand* dan daring melalui platform YouTube.
- b. Menghasilkan produk jurnalistik yang bisa memperkenalkan Teluk Bintuni sebagai kabupaten memiliki berbagai potensi.
- c. Menjadi wadah bagi masyarakat Teluk Bintuni agar dapat memperkenalkan daerahnya dan bersuara terkait permasalahan di daerah.

1.3 Kegunaan Karya

Karya ini memiliki beberapa kegunaan. Berikut beberapa kegunaan dari karya “Rumah Torang”.

- a. Mendorong pengembangan ilmu jurnalistik dalam produksi video dokumenter ihwal penerapan teori *new media* dan *agenda setting*.
- b. Menumbuhkan kepedulian khalayak atas isu daerah, terutama di Teluk Bintuni.

- c. Menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dan membuat kebijakan baru di Teluk Bintuni demi kesejahteraan masyarakatnya.



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA